

KONTROVERSI MISS INDONESIA TAHUN 1982-1984

Arba' Inda Fajarini

Jurusan Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Surabaya
E-mail: farinrave@gmail.com.

M. Ali Haidar

Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Surabaya

Abstrak

Kontes kecantikan menjadi salah satu wadah bagi perempuan untuk menunjukkan eksistensinya di dalam masyarakat. Kontes ini sudah diadakan di Indonesia sejak masa kolonial dengan tujuan mencari sosok perempuan yang mampu menjadi panutan bagi perempuan dan masyarakat di sekitarnya. Dengan berbagai alasan para perempuan berlomba-lomba untuk dapat menjadi bagian dari kontes kecantikan. Kontroversi pun tidak pernah lepas dari kontes kecantikan mengingat subyek dan obyek yang ditampilkan adalah perempuan.

Kata Kunci: Kontroversi, Miss Indonesia

Abstract

Beauty contests became one forum for women to show their existence in the community. This contest has been held in Indonesia since the colonial period with the aim of seeking a female figure who is able to be a role model for women and the surrounding community. With a variety of reasons these women vying to be part of the beauty contest. Controversy was never separated from the beauty contest considering subjects and objects displayed are women.

Keywords: Controversy, Miss Indonesia

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu negara yang giat melaksanakan kontes kecantikan atau pemilihan putera-puteri kecantikan. Berbagai pemilihan puteri yang ada di Indonesia antara lain seperti pemilihan Puteri Indonesia, Miss Indonesia, Miss Celebrity Indonesia, Raka-Raki Jawa Timur, dan sebagainya. Pemilihan ini tidak hanya diselenggarakan oleh pemerintah, namun pihak swasta juga turut aktif menyelenggarakan kontes kecantikan.

Dalam satu tahun dapat terselenggara lebih dari lima jenis pemilihan. Hal ini menunjukkan adanya antusias yang tinggi dari masyarakat terhadap kontes kecantikan. Pemenangnya akan menjadi duta atau wakil Indonesia sesuai jenis kontes kecantikan yang menyelenggarakan. Misalnya, pemenang Puteri Indonesia akan mewakili Indonesia dalam ajang Miss Universe, pemenang Asia's Top Model yang disponsori oleh sampo Tresemme akan menjadi brand ambassador sampo Tresemme, dan sebagainya.

Namun di balik sukses dan ramainya kegiatan ini, terdapat banyak protes dari berbagai pihak yang menentang diselenggarakannya pemilihan-pemilihan seperti ini. Protes-protes biasanya muncul dari organisasi-organisasi agamis misalnya Front Pembela Islam (FPI) yang paling vokal dalam menentang kontes kecantikan. Protes semakin santer ketika pada tahun 2013 yang lalu, Indonesia mendapat kehormatan menjadi tuan rumah penyelenggaraan pemilihan Miss World 2013 yang rencananya akan dilaksanakan di Jakarta. Berbagai aksi

dilakukan agar pemerintah bersedia menolak dan membatalkan rencana penyelenggaraan Miss World. Meskipun akhirnya kegiatan dipindah ke Bali, protes dan aksi-aksi menentang tetap ramai dilakukan.¹

Kontroversi terhadap kontes kecantikan bukan merupakan hal baru. Sejak pertama kali diselenggarakan protes-protes telah mengiringi perjalanan kontes kecantikan di Indonesia. Bahkan di negara asalnya yakni Amerika Serikat, berbagai demonstrasi menentang kontes kecantikan kerap terjadi. Selain karena kontes kecantikan dianggap sebagai bentuk eksploitasi perempuan, juga dapat menimbulkan kecemburuan sosial di antara kaum perempuan.

Sejak awal abad 20, perempuan Indonesia mulai terbuka pemikirannya untuk memajukan diri mereka dan orang-orang di sekitarnya. Hal ini merupakan salah satu hasil dari emansipasi perempuan yang digagas oleh perempuan-perempuan Indonesia seperti Kartini dan Dewi Sartika. Melalui pengajaran-pengajaran non formal, para perempuan belajar berorganisasi dan belajar tampil di depan publik dalam berbagai kesempatan.

Kontes kecantikan adalah salah satu wadah di mana para perempuan Indonesia saling menonjolkan kecantikan dan kemampuan dirinya masing-masing. Ini adalah salah satu cara mereka untuk menunjukkan eksistensinya kepada masyarakat. Dalam kontes ini akan

¹ <http://www.voaindonesia.com/content/miss-muslimah-untuk-tandingi-miss-world/1753492.html>
diakses 24 Juli 2014 pkl.12.13

dipilih para perempuan yang dapat menjadi teladan dan inspirator bagi lingkungan sekitarnya khususnya para perempuan. Mereka adalah wanita Indonesia yang bisa dijadikan panutan untuk masyarakat Indonesia tentang bagaimana cara ikut andil dalam pembangunan dengan cara dan kapasitasnya.² Dengan cara ini perempuan akan merasa memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan laki-laki dalam hal pembangunan dan bela negara.

Pemilihan Puteri Indonesia diselenggarakan sejak tahun 1967. Hak penyelenggaraan pemilihan Miss Indonesia dipegang oleh Yayasan Pembina Putri Indonesia (YPPPI). Yayasan ini dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur semasa Ali Sadikin, sebagai bentuk realisasi pelimpahan kebijaksanaan dari Menteri Perhubungan kepada Ditjen Pariwisata DKI Jakarta.³ Dalam kegiatannya, YPPPI bekerjasama dengan pihak sponsor yang sekaligus sebagai pemegang lisensi penyelenggaraan pemilihan Miss Indonesia.

Sejak tahun 1960-an Indonesia telah berpartisipasi mengirimkan putri – putri terbaiknya dalam kontes-kontes kecantikan internasional seperti Miss International, Miss Asia Quest, Queen of the Pacific, Miss Charming International, Miss World, hingga Miss Universe—yang masih berjalan hingga saat ini. Tidak hanya sekedar mewakili negaranya, namun beberapa putri berhasil menjuarai kontes internasional tersebut. Mereka antara lain Irene Sutanto yang meraih gelar Queen of the Pacific pada 1973, Linda Emran meraih gelar Miss Asia Pasific 1977 yang dilaksanakan di Manila, serta Fransisca Warastoeti yang dinobatkan sebagai Queen of the Pacific pada 1975.

Salah seorang pemegang lisensi penyelenggaraan pemilihan Miss Indonesia adalah Andi Nurhayati, seorang ahli kecantikan sekaligus pengusaha besar di bidang kosmetik. Sebagai pemegang lisensi, Andi telah mengirimkan putri-putri Indonesia dalam kontes-kontes kecantikan internasional seperti Miss International, Miss Universe, dan Miss World.

Penyelenggaraan Miss Indonesia tentunya mengandung berbagai kepentingan sosial-ekonomi-politik. Menurut penyelenggara, tujuan pengiriman tersebut adalah untuk memperkenalkan Indonesia kepada dunia sehingga Indonesia tidak terbelakang dalam pergaulan dunia. Di sisi lain, pihak sponsor juga memiliki kepentingan untuk mempromosikan produknya. Hal ini tentu sangat menguntungkan pihak produsen apalagi jika berperan sebagai pemegang lisensi.

Sebagian masyarakat Indonesia menilai bahwa kontes ratu kecantikan seperti itu tidak sesuai dengan adat ketimuran yang dimiliki bangsa Indonesia sejak dahulu. Kontroversi terhadap ajang ini muncul karena masyarakat selalu mengaitkan ajang pemilihan putri Indonesia dengan ajang *Bathing Beauty*. *Bathing Beauty* merupakan sebuah festival pakaian renang yang

diselenggarakan oleh perusahaan Catalina Swimwear di Long Beach, California, USA yang diselenggarakan pada 1950-an. Meskipun dalam beberapa hal ajang pemilihan putri tidak memiliki keterkaitan dengan *Bathing Beauty*, masyarakat tetap saja melihat bahwa pemilihan putri identik dengan *Bathing Beauty*.⁴

Karena banyaknya kontroversi yang muncul, maka pemerintah mengeluarkan larangan-larangan untuk menyelenggarakan dan mengirimkan putri Indonesia ke ajang internasional. Pada tahun 1970-an Menteri P & K pernah mengeluarkan kebijakan, walaupun tidak ada Surat Keputusan resmi, untuk tidak menyelenggarakan pemilihan ratu di Indonesia karena dianggap tidak sesuai dengan situasi perjuangan bangsa.⁵ Mengenai larangan yang dilontarkan, pemerintah Orde Baru secara eksplisit tidak pernah memberikan alasan lebih jauh. Diduga pelarangan ini muncul karena Ibu Tien Soeharto, selaku istri presiden, tidak pernah berkenan dengan ajang putri-putrian seperti ini. Alasannya, tentu bertitik tolak dari anggapan moral dan tidak bermoralnya ajang ini.⁶

Semakin maraknya penyelenggaraan dan pengiriman putri-putri Indonesia ke kontes kecantikan luar negeri, membuat pemerintah semakin gerah. Tahun 1980-an pemerintah mulai mengeluarkan peraturan-peraturan resmi mulai dari sekedar menertibkan hingga benar-benar melarang terselenggaranya kontes kecantikan di tanah air.

Meskipun demikian, beberapa sponsor dan mereka yang memegang lisensi sebagai penyelenggara di tingkat nasional, hujatan dan larangan pemerintah tentu merupakan pukulan yang tidak ringan. Hal itu dapat dilihat, misalnya dari kasus Andi Nurhayati, seorang pemegang lisensi untuk pengiriman di ajang Miss World. Setelah Andi Nurhayati berhasil mengirimkan Titi Dwi Jayati, ia segera memutuskan untuk melepaskan lisensi miliknya. Ia juga kemudian melepaskan lisensi Miss Asia Quest.⁷ Kontroversi ini juga memberikan dampak yang besar bagi para kontestan dan juga masyarakat.

Peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan ini karena kontes kecantikan di Indonesia telah menuai protes dari masyarakat sejak pertama kali diselenggarakan. Kontes kecantikan Miss Indonesia menarik perhatian dari berbagai pihak dan menimbulkan kontroversi hingga pemerintah harus ambil bagian untuk mengendalikan situasi agar tetap kondusif.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis meneliti mengenai KONTROVERSI MISS INDONESIA TAHUN 1982-1984 yang dapat dirumuskan dalam beberapa permasalahan yaitu (1) Apa penyebab munculnya kontroversi Miss Indonesia 1982-1984?, (2) Bagaimana upaya pemerintah dalam mengatasi

² Reyza Fitri Aninda. 2012. *Perlindungan Hukum Terhadap Hak bagi Peserta, Pemenang, Penyelenggara, dan Pihak Ketiga dalam Penyelenggaraan Kontes Kecantikan di Indonesia*. Fakultas Hukum Universitas Airlangga, hal:1.

³ *Sketmasa*, tanggal 1-15 Agustus 1980, hal:28

⁴ Mutiah Amini, Laporan Penelitian *Dinamika Pemilihan “Putri Indonesia” pada Masa Orde Baru*, diterbitkan oleh Universitas Gadjah Mada, diakses dari www.geocities.ws/.../mutia_amini_makalah_putri_indonesia_.pdf pada tanggal 23 Mei 2013, hal:11-12

⁵ *Sketmasa*, tanggal 1-15 Agustus 1980. *loc.cit*

⁶ Mutiah Amini. *op.cit.*, hal:12

⁷ Mutiah Amini. *ibid.*, hal:16

kontroversi Miss Indonesia 1982-1984?, (3) Bagaimana dampak kontroversi Miss Indonesia tahun 1982-1984?

Penelitian yang berjudul *Kontroversi Miss Indonesia tahun 1982-1984* ini merupakan kajian sejarah sinkronik yang merekonstruksi peristiwa sosial. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode sejarah. Terdapat empat langkah yang digunakan dalam kegiatan metode penulisan sejarah yaitu heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi.

Langkah pertama adalah heuristik yaitu menelusuri dan mengumpulkan sumber-sumber sejarah yang berhubungan dengan obyek penelitian. Sumber primer yang didapatkan adalah sumber tulisan berupa koran dan majalah dari tahun 1982 hingga tahun 1984 yang memuat berita mengenai pemilihan Miss Indonesia, Miss Universe, dan Miss World tahun 1982-1984, antara lain Majalah *Sketmasa*, *Tempo*, *Topik*, *Jawa Pos*, dan lain-lain. Pencarian sumber tersebut dilakukan di Laboratorium Sejarah Jurusan Pendidikan Sejarah Unesa, Perpustakaan Medayu Agung, dan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (PNRI). Sumber primer berupa koran dan majalah dipilah dan dikelompokkan berdasarkan jenis peristiwa yang terjadi. Sumber primer lain adalah Kepmendikbud RI No. 0237/U/1984 yang didapatkan dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI).

Selain sumber primer, sumber sekunder yang digunakan dalam penulisan ini adalah hasil-hasil penelitian terdahulu dan artikel yang membahas pemilihan Puteri Indonesia antara lain penelitian Mutiah Amini yang berjudul *Dinamika Pemilihan "Putri Indonesia" pada Masa Orde Baru*. Penelitian ini menggambarkan kontrol sosial dari masyarakat dan pemerintah mengenai segala bentuk kontes kecantikan di Indonesia. Penelitian lain adalah skripsi Rahma Kusuma Sulistyaningrum yang berjudul *Mitos Kecantikan dalam Tayangan Pemilihan Putri Indonesia 2009*. Penelitian ini membahas mitos kecantikan yang diciptakan melalui kontes kecantikan. Buku-buku mengenai sosial, politik, budaya, dan perempuan juga digunakan untuk menunjang pengkajian pro-kontra masyarakat mengenai kontes kecantikan ini seperti buku *Sosiologi: Teks Pengantar & Terapan* karya J. Dwi Narwoko & Bagong Suyanto, *"Mitos Kecantikan: Kala Kecantikan Menindas Perempuan"* karya Naomi Wolf, *"Kota-kota di Jawa: Gaya Hidup dan Permasalahan Sosial"* karya Sri Margana dan M Nursam, dan buku-buku penunjang lainnya.

Kegiatan selanjutnya adalah kritik sumber atau tahap analisis yaitu menguji kredibilitas sumber. Kritik yang diutamakan adalah kritik intern yaitu menguji isi atau kandungan sumber dengan cara membandingkan data dari tiap-tiap sumber yakni koran, majalah, arsip, dan jurnal ilmiah. Hal ini dilakukan untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Tidak semua sumber menyajikan informasi yang sama meskipun dalam tema yang sama. Oleh karena itu, data yang diutamakan adalah yang berasal dari waktu yang sama atau hampir sama dengan judul penelitian serta subyek keberapa yang menginformasikannya. Misalnya data yang diambil dari sebuah talkshow dengan Titi Dwi Jayati, wakil Indonesia dalam Miss World 1983.

Setelah dilakukan kritik kemudian akan dilakukan interpretasi (tahap sintesis). Metode ini untuk menemukan dan memahami fakta serta rangkaian antar fakta sehingga diketahui hubungan antar fakta secara utuh. Fakta yang berhasil ditafsirkan oleh peneliti antara lain pemilihan Miss Indonesia 1982 dan 1983, keikutsertaan Indonesia dalam kontes kecantikan internasional tahun 1982-1983, berbagai pendapat pro dan kontra dari berbagai pihak, larangan-larangan mengenai kontes kecantikan di Indonesia yang dikeluarkan oleh pemerintah, dan dampak adanya kontroversi terhadap kontes kecantikan Indonesia.

Fakta-fakta sejarah yang telah diperoleh kemudian disusun secara kronologis dan disajikan sebagai laporan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul *"Kontroversi Miss Indonesia Tahun 1982-1984"*.

B. Pembahasan

1. Pemilihan Miss Indonesia 1982-1984

Sejak tahun 1967 hak penyelenggaraan pemilihan Miss Indonesia dipegang oleh Yayasan Pembina Putri Indonesia (YPPI). Yayasan ini dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur semasa Ali Sadikin, sebagai bentuk realisasi pelimpahan kebijaksanaan dari Menteri Perhubungan Emil Salim kepada Ditjen Pariwisata DKI Jakarta Sutopo Josomihardjo.⁸ Dalam kegiatannya, YPPI bekerjasama dengan pihak sponsor yang sekaligus sebagai pemegang lisensi penyelenggaraan pemilihan Miss Indonesia.

a. Miss Indonesia 1982

Pada akhir April 1982 telah dilangsungkan pemilihan Miss Indonesia 1982. Acara ini dilaksanakan di tempat yang dirahasiakan mengingat pada tahun ini masih ramai kontroversi kontes kecantikan di Indonesia. Salah satu penyelenggaranya tak lain dan tak bukan adalah Andi Nurhayati. Meski publikasinya hanya secara lisan dari mulut ke mulut, namun ternyata mampu menyerap sebanyak 70 orang peserta.

Pada malam final terpilih lima pemenang. Andi Nurhayati menunjuk Sri Yulianti untuk maju ke ajang Miss Universe 1982 yang akhirnya dilaksanakan pada 26 Juli 1982 di Lima, Peru.⁹

Selain Sri Yulianti, ada Andi Botenri yang dikirim mengikuti Miss Asia Quest 1983 di Kuala Lumpur, Malaysia pada 15 Juli 1982.¹⁰ Kedua gadis Indonesia ini tentu saja menarik perhatian masyarakat mengingat pemerintah telah melarang adanya pemilihan maupun ikut serta dalam pemilihan ratu kecantikan. Baik Sri Yulianti maupun Andi Botenri, keduanya berangkat ke luar negeri secara tidak resmi.

Sekembalinya dari Miss Asia Quest, Andi Botenri kembali dikirim untuk mengikuti ajang Miss World di London, Inggris, yang akhirnya dilaksanakan pada 18

⁸ *Sketmasa* tanggal 1-15 Agustus 1980, *loc.cit.*

⁹ *Tempo*, 14 Agustus 1982, hal:23

¹⁰ *Ibid.*

November 1982. Sama seperti sebelumnya, Andi Botenri tidak berhasil meraih mahkota keratuan.¹¹

b. Miss Indonesia 1983

Pada tahun ini, protes dari masyarakat masih ramai dilontarkan. Melalui seleksi tertutup, Andi Botenri kembali dikirim ke ajang internasional. Kali ini ia mewakili Indonesia dalam ajang Miss Universe di Kiel Auditorium, St. Louis, Missouri, Amerika Serikat. Final Miss Universe dilaksanakan pada 11 Juli 1983. Di ajang inipun Botenri tidak meraih kemenangan karena terlambat datang sepuluh hari setelah kegiatan dimulai. Selain itu, tenaganya banyak terkuras akibat memikirkan protes-protes di Indonesia mengenai keikutsertaannya dalam kontes Miss Universe.¹²

Perempuan Indonesia kedua yang dikirim ke luar negeri adalah Titi Dwi Jayati. Ia ditunjuk mewakili Indonesia dalam ajang Miss World¹³ yang akhirnya dilaksanakan pada tanggal 17 November 1983 di London, Inggris.

c. Miss Indonesia 1984

Pada tahun ini tidak diselenggarakan pemilihan Miss Indonesia. Diduga karena semakin maraknya protes keras dari masyarakat dan pemerintah yang sangat memojokkan pihak penyelenggara. Alasan inilah yang menyebabkan Andi Nurhayati memutuskan untuk melepaskan lisensi penyelenggaraan dan pengiriman putri Indonesia ke kontes luar negeri. Akibatnya Indonesia tidak turut ambil bagian dalam kontes kecantikan internasional seperti Miss World dan Miss Asia Quest.

2. Persyaratan Calon Peserta Miss Indonesia

Persyaratan calon peserta menjadi salah satu penyebab kontroversi terhadap kontes kecantikan di Indonesia.

Pada pemilihan tahun 1960-an kriteria yang diutamakan adalah kualitas fisik. Peserta harus memiliki ukuran tubuh yang ideal yang salah satunya dilihat dari ukuran DPP (Dada-Pinggang-Pinggul). Pengukuran seperti ini tentu tidak dapat dilakukan hanya dengan melihat dengan mata, melainkan harus dengan sentuhan tangan para juri. Cara seperti inilah yang dapat menjerus kepada pelecehan seksual. Banyak orang tua yang melarang putri-putrinya untuk mengikuti kontes kecantikan karena khawatir akan hal tersebut.

Adanya sesi pakaian bikini juga dinilai tidak mencerminkan kesopanan terutama bagi orang Indonesia. Seperti kata pepatah Jawa : *ajining rogo soko busono*. Perempuan seharusnya harus berperilaku sopan ketika di depan umum salah satunya dengan berpakaian yang rapi dan sopan.

Persyaratan pada tahun 1970-an dan 1980-an juga hampir sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Ada tambahan persyaratan yang positif yaitu mampu

menampilkan kesenian daerahnya.¹⁴ Selain kualitas fisik, kemampuan intelektual juga diutamakan karena tugas seorang ratu kecantikan tidak hanya sebagai model pakaian dan kosmetik, tetapi juga melakukan tugas-tugas penting kenegaraan seperti menyambut tamu kehormatan, menjadi duta Indonesia dalam bidang kebudayaan, dan sebagainya.

Sesi memakai bikini juga tidak dapat dihindari karena pada kontes kecantikan internasional juga dituntut untuk mengikuti sesi memakai bikini. Kontroversi terhadap sesi bikini ini muncul karena masyarakat selalu mengaitkan ajang pemilihan putri Indonesia dengan ajang *Bathing Beauty* di California, USA yang diselenggarakan pada 1950-an. Dari sesi bikini dapat diketahui peserta mana yang memiliki bentuk tubuh yang ideal dan indah. Dari sinilah masyarakat menganggap bahwa para perempuan hanya akan dimanfaatkan oleh pihak-pihak pengusaha untuk kepentingan promosi produknya.

3. Motif Kepentingan dalam ajang Miss Indonesia

a. Motif ekonomi

Pemilihan Miss Indonesia juga tidak terlepas dari adanya kepentingan ekonomi yang mendasari penyelenggaraannya. Industri kecantikan, yang paling berkaitan dengan ajang ini, berlomba-lomba mempengaruhi cara berpikir masyarakat agar bisa mengikuti trend kecantikan yang mereka buat. Dengan demikian, masyarakat akan berlomba-lomba menggunakan produk yang dikeluarkan, dan akhirnya bisnis mereka akan tetap berjalan dengan sangat baik.¹⁵

Sebagai seorang pengusaha, maka seseorang harus pandai menilai dan memanfaatkan peluang yang ada. Begitu pula dengan Andi Nurhayati yang memiliki berbagai unit usaha di bidang kecantikan. Menurut Andi, kontes kecantikan menjadi salah satu sarana yang sangat efektif sebagai arena promosi berbagai macam produk, seperti produk kecantikan, kesehatan, *fashion*, dan pariwisata. Tidak heran jika Andi Nurhayati rela mengeluarkan biaya banyak demi mengikuti sebuah kontes kecantikan nasional bahkan internasional meskipun tidak dibiayai oleh pemerintah.

Gelar Ratu Kecantikan yang berhasil disandang oleh seorang perempuan (kontestan) bisa menjadi 'podium' yang bagus untuk mewujudkan tujuan diselenggarakannya kontes kecantikan tersebut dan mencapai visi dan misi penyelenggara.¹⁶ Keberhasilan kontestan tersebut akan menguatkan kepercayaan masyarakat akan kemampuan penyelenggara dalam menyelenggarakan suatu kontes kecantikan. Pihak sponsor pun akan 'kecipratan' untung dari keberhasilan ini. Pihak sponsor yang umumnya adalah suatu perusahaan yang bergerak di bidang jasa maupun dagang akan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat karena telah berhasil turut serta menyukseskan suatu kegiatan. Imbasnya, masyarakat akan semakin percaya untuk

¹¹ Fokus, 4 Agustus 1983, hal:5

¹² Jawa Pos, 24 November 2005, hal: 15

¹³ Program "Sarah Sechan" Net TV, diakses pada tanggal 23 Mei 2014

¹⁴ Tempo, 12 Maret 1977, hal: 26-27

¹⁵ "Industri Kecantikan", *Analisa Media*, edisi September 2013, hal: 5

¹⁶ Reyza Fitri Aninda. *ibid*, hal: 2-3

menggunakan jasa atau produk dari perusahaan sponsor tersebut.

b. Motif Sosial

Setiap orang tentu memiliki keinginan untuk mencapai status yang lebih tinggi dan lebih baik dari apa yang telah dimilikinya sejak lahir. Terdapat dua jenis mobilitas sosial yakni mobilitas sosial vertikal dan mobilitas sosial horizontal.¹⁷ Saluran-saluran untuk mencapai mobilitas sosial pun bermacam-macam seperti lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, dan sebagainya. Salah satu saluran yang dibahas dalam penelitian ini adalah kontes kecantikan Miss Indonesia.

Menjadi seorang ratu kecantikan dari sebuah kontes kecantikan seperti Miss Indonesia merupakan suatu kebanggaan yang besar bagi para wanita. Dengan ikut serta berkompetisi dalam Miss Indonesia maka para wanita akan merasa berada dalam kelas sosial yang lebih tinggi yang merupakan sekelompok perempuan cantik dan cerdas serta berkepribadian baik. Tidak heran jika ketika dibuka pendaftaran kontes kecantikan seperti Miss Indonesia, para gadis akan berduyun-duyun untuk mendaftar sebagai kontestan tak peduli apakah kontes kecantikan tersebut resmi atau tidak resmi.

Mobilitas sosial horizontal adalah perpindahan individu atau objek-objek sosial lainnya dari suatu kelompok sosial yang satu ke kelompok sosial lainnya yang sederajat.¹⁸ Pada mobilitas ini status seseorang tidak mengalami kenaikan atau penurunan derajat. Salah satu Miss Indonesia yang mengalami mobilitas sosial horizontal adalah Andi Botenri. Dia adalah seorang keturunan bangsawan Bugis. Dengan mengikuti Miss Indonesia, derajatnya tidak naik atau turun, tetapi dia mendapatkan *privilege* atau keuntungan dari mengikuti Miss Indonesia. setelah mengikuti berbagai kontes kecantikan internasional, dia banyak dikenal orang di luar negeri. Dia juga berkesempatan mempromosikan produk-produk dari merek terkenal.

Sri Yulianti, wakil Indonesia dalam ajang Miss Universe 1982, adalah keponakan seorang jenderal, juga merasa bangga dapat ikut serta dalam kontes kecantikan bergengsi itu. Menjadi peserta rasanya seperti menjadi pejabat penting pemerintahan. Ketika turun dari pesawat di Peru, semua penumpang dilarang turun sebelum dia dan wakil Selandia Baru turun terlebih dahulu. Orang-orang menyambutnya dengan membuat pagar betis. Di sana para peserta tinggal di salah satu hotel terbaik Peru yakni Grand Hotel Bolivar. Setiap peserta pun dikawal oleh dua orang petugas dan dijaga oleh empat orang polisi.¹⁹

Selain mobilitas horizontal, jenis mobilitas sosial lain yang didapat dari mengikuti kontes kecantikan adalah mobilitas vertikal. Mobilitas vertikal adalah perpindahan individu atau objek sosial ke kedudukan sosial lainnya yang tidak sederajat. Ada dua jenis

mobilitas vertikal yakni gerak sosial yang meningkat (*social climbing*) dan gerak sosial yang menurun (*social sinking*).²⁰

Miss Indonesia yang mengalami *social climbing* adalah Titi Dwi Jayati. Titi Dwi Jayati senang bisa mengikuti ajang Miss World karena untuk pertama kalinya ia akan pergi ke luar negeri. Naik pesawat terbang saat itu menjadi pengalaman pertamanya naik pesawat terbang mengingat kehidupan ekonomi keluarganya saat itu yang sangat pas-pasan. Titi sangat melepaskan diri ketika mengikuti ajang Miss World. Di pikirannya saat itu bukanlah menjadi juara atau tidak, tetapi membayangkan dia akan pergi ke luar negeri dan bertemu dengan orang-orang dari berbagai belahan dunia. Di London, Titi sangat akrab dengan Miss Malaysia Michelle Yeoh dan Miss Hongkong Maggie Cheung. Saat ini keduanya telah menjadi aktris hebat di Hollywood.²¹ Setelah mengikuti Miss World, Titi mendapat banyak tawaran bermain film dan menyanyi.

4. Pandangan Masyarakat Mengenai Miss Indonesia

Di Indonesia, kontroversi mengenai kontes kecantikan juga tak kalah ramainya. Berbagai lapisan masyarakat menyuarakan pendapatnya baik yang mendukung maupun menolak dengan alasan-alasan yang beragam pula. Ajang ini seringkali terlihat hanya sebagai ajang yang hanya menonjolkan aspek kecantikan saja. Meskipun dalam slogannya yang digembar-gemborkan adalah kecantikan jasmani dan rohani, namun seakan-akan yang menjadi penilaian utama adalah cantik secara fisik. Hanya perempuan-perempuan cantik yang dapat mengikuti kegiatan ini dan hanya yang paling cantik fisik-lah yang dapat menyanggah gelar sebagai ratu kecantikan. Namun ada juga orang-orang yang mendukung diselenggarakannya kontes kecantikan di Indonesia.

a. Pihak Pro

Pihak ini terdiri dari pemerintah, penyelenggara, peserta kontes kecantikan, dan perusahaan majalah.

Dalam Kepmendiknas No. 0237/U/1984 disebutkan bahwa kontes kecantikan yang berdampak positif adalah yang mampu mempromosikan peningkatan produksi dalam negeri. Haryati Soebadio, Dirjen Kebudayaan, mengatakan kontes kecantikan di Indonesia sah-sah saja diselenggarakan asalkan memiliki dampak positif yakni sebagai sarana mempromosikan pakaian produksi dalam negeri.²² Dengan promosi-promosi dari peserta Miss Indonesia diharapkan produksi pakaian akan mengalami peningkatan sehingga perekonomian negara akan turut meningkat. Pemilihan ratu-ratu lokal mungkin sah-sah saja jika digunakan untuk mempromosikan budaya dan pariwisata di negeri sendiri. Akan lebih bernilai positif juga jika para pemenang itu dapat menarik minat masyarakat Indonesia untuk mempelajari budaya yang ada di Indonesia.

¹⁷ Sudarso: Mobilitas Sosial dalam J. Dwi Narwoko & Bagong Suyanto. 2004. *Sosiologi: Teks Pengantar & Terapan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hal: 208

¹⁸ Sudarso, *op.cit*, hal: 209-210

¹⁹ Jawa Pos, 06 Agustus 1982, hal: 1

²⁰ Sudarso, *op.cit*, hal: 208-209

²¹ Jawa Pos, 25 November 2005, hal: 15

²² Tempo, 14 Juli 1984, hal: 15

Menurut penyelenggara, syarat dan ketentuan untuk mengikuti kontes kecantikan di Indonesia tidak berbeda dengan praktek pemilihan ratu di luar negeri, misalnya untuk Miss Universe di Amerika Serikat. Aspek penilaian yang digunakan meliputi 3B (*Brain, Beauty, Behaviour*) atau kecerdasan, kecantikan, dan kepribadian. Namun sangat disayangkan karena selama ini pers Indonesia hanya memberitakan sisi negatifnya saja seperti pengukuran data fisik perempuan atau foto sejumlah ratu yang sedang berbaju renang mempertontonkan aurat.²³ Hal inilah yang dapat memperburuk citra kontes kecantikan di mata masyarakat.

Andi Botenri, wakil Indonesia dalam Miss Universe 1983, berpendapat bahwa kontes kecantikan Miss Indonesia dan Miss Universe merupakan kegiatan positif. Tujuan penyelenggaraan Miss Universe adalah untuk menggalang persatuan dan perdamaian dunia, bukan sekedar ajang pamer badan. Selain cantik, para peserta harus memiliki modal perilaku yang baik dalam pergaulan baik dengan sesama jenis maupun dengan lawan jenis. Lidya Arlini Wahab, Ratu Indonesia 1973-1974, mendapat berbagai pengalaman seperti memperkenalkan tanah air di forum internasional, menjawab pertanyaan juri, dan menambah teman dari berbagai negara di dunia.²⁴

Majalah *Varia* yang menjadi pelopor pemilihan ratu-ratuan di Indonesia dan telah berkali-kali menyelenggarakan pemilihan Miss dan Mr. *Varia*, tidak setuju jika ada yang mengatakan bahwa kegiatan ratu-ratuan merupakan kegiatan yang hanya akan menjatuhkan derajat kaum wanita. Bahkan sebaliknya, para pemuda dan pemudi yang pernah terpilih sebagai pemenang kontes kecantikan telah mampu menaikkan gengsi kaum wanita Indonesia di tingkat nasional maupun internasional dengan kelebihannya di bidang kecantikan, kesopanan, dan intelegensi.²⁵ Belum pernah ada kabar bahwa para ratu dan raja kecantikan tersebut membuat aib bagi bangsanya.

b. Pihak Kontra

Pihak ini terdiri dari pemerintah, peserta kontes kecantikan, dan tokoh agama.

Menteri P & K periode 1979-1982, Daoed Joesoef, adalah salah seorang yang sangat tidak menyetujui kegiatan semacam itu. Menurutnya, kontes kecantikan hanya akan menurunkan martabat wanita Indonesia. Para wanita dijadikan obyek dagang oleh para sponsor yang ingin meraup banyak keuntungan dari diselenggarakannya ajang Miss Indonesia.²⁶ Masih banyak cara positif untuk memajukan derajat kaum wanita, salah satunya melalui pendidikan, bukan melalui kontes kecantikan.

Sikap kontra juga ditunjukkan oleh Ny. Lasiyah Soetanto, Menteri Muda Urusan Peranan Wanita sekaligus ketua KOWANI (Kongres Wanita Indonesia).

Menurutnya, kontes kecantikan tidak jauh beda dengan kontes hewan ternak.²⁷ Sangat dikhawatirkan jika ajang ini akan dijadikan ajang pencarian pendamping bagi para lelaki hidung belang. Para wanita dipamerkan layaknya barang dagangan agar dapat dipilih dan dibeli oleh para pembeli yang hadir di sana.

Ternyata tidak semua peserta kontes kecantikan merasa bangga menjadi seorang ratu kecantikan. Salah satunya adalah Roosye Soeratman. Tahun 1981 rencananya ia akan dikirim untuk mengikuti Miss Universe di New York, Amerika Serikat, namun ternyata gagal. Dia gagal dikirim karena permintaan visa-nya ditolak. Pembatalan ini membuat Roosye senang karena sebenarnya dari awal dia tidak menyukai kegiatan semacam ini. Ketika terpilih sebagai Gadis Teladan, dia tidak tahu kalau akan dikirim ke pemilihan Miss Universe. Roosye sama sekali tidak melihat manfaat dari pemilihan ratu kecantikan tersebut, apalagi jika harus tampil dengan mengenakan bikini.²⁸

Ulama besar Buya Hamka juga pernah mengecam kontes semacam ini. Beliau menuturkan:

*"Orang-orang perempuan maju kemuka berlomba merebut kehidupan, sehingga alat-alat penghias diri, alat-alat kecantikan lebih melebihi mahalannya. Kemudian muncullah lomba kecantikan, memperagakan diri, lomba ratu-ratuan. Perempuan muda yang cantik tampil ke muka mendedahkan (memamerkan) dada, pinggul, dan pahanya, ditonton bersama dan diputuskan oleh juri siapa yang lebih cantik tampil ke muka mendedahkan. Maka ratu-ratu kecantikan itu jangan sampai menurun. Dan ini pun menghendaki perbelanjaan banyak dan mewah. Macam-macam nama yang diberi bagi ratu-ratu itu; Ratu Personality, Ratu luwes, Ratu daerah, Ratu Propinsi, Ratu Nasional, dan Ratu internasional."*²⁹

Buya Hamka menegaskan bahwa tidak perlu dan tidak seharusnya perempuan tampil ke muka berteriak-teriak menuntut persamaan hak dengan laki-laki. Dalam Islam sudah ditegaskan bahwa setiap manusia, laki-laki maupun perempuan memiliki kedudukan di dalam agama dan di hadapan Allah. Perbedaan derajat ditentukan oleh seberapa kuat iman yang tertanam dalam hatinya. Perempuan sebagai istri dan ibu bertugas mengurus segala keperluan rumah tangga, melayani suami, dan mendidik putra-putrinya.

5. Pertentangan dengan Nilai Budaya Indonesia

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Diakses dari <http://www.voaislam.com/read/liberalism/2013/09/02/26607/buya-hamka-tentang-bahaya-kontes-kecantikan-miss-world/#sthash.gKC2EDha.dpbs> pada tanggal 03 Juni 2014

²³ *Tempo*, 14 Agustus 1982, hal: 26

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Varia*, No.796, 18 Juli 1973

²⁶ *Tempo*, 14 Agustus 1982, *loc.cit.*

Kontes kecantikan seperti Miss Indonesia menganut budaya modern yang diadopsi dari budaya Barat melalui sebuah proses yang disebut globalisasi. Dalam kontes kecantikan terdapat sesi bikini. Bikini merupakan pakaian renang yang diciptakan di negara Barat. Dengan alasan modernitas, Miss Indonesia menirunya walaupun harus memperlihatkan bagian-bagian tubuh perempuan yang bersifat pribadi. Dalam sesi yang lain, para peserta juga diharuskan berlenggak-lenggok di atas *catwalk* agar dapat menunjukkan sisi kecantikannya.

Budaya Barat dalam kontes kecantikan sangat bertentangan dengan nilai budaya Indonesia. Bangsa Indonesia telah dikenal sebagai bangsa yang menjunjung tinggi norma kesusilaan. Dalam adat budaya Jawa, norma kesusilaan dalam kehidupan masyarakat memegang peranan penting, karena manusia dinilai baik dan buruk tergantung tingkah laku kesusilaan.³⁰

Perempuan dan kesusilaan tidak dapat dipisahkan. Perempuan sebagai anak, istri, dan ibu sudah seharusnya menjaga tingkah lakunya karena perempuanlah yang mampu mengendalikan nasib bangsanya. Perempuan yang menjaga tingkah lakunya akan menjadi panutan bagi keluarga dan masyarakat di sekitarnya. Susila adalah cerminan suara hati manusia yang memahami diri sebagai makhluk susila atau bermoral. Perempuan yang bersusila mampu memahami dirinya sendiri yang sedalam-dalamnya, yaitu memahami diri sebagai kodratnya makhluk yang berakal, berasa dan berkehendak, serta memahami diri sebagai makhluk Tuhan.³¹

Kontes Miss Indonesia seringkali dikaitkan dengan usaha perjuangan perempuan dalam mendapatkan kesetaraan gender. Perempuan menginginkan keberadaannya diakui dan dihargai. Karena terlalu terobsesi dengan keinginan sejajar dengan kaum laki-laki, seringkali mereka lupa dengan kodratnya sebagai perempuan. Kesetaraan gender tidak berarti bahwa perempuan harus menjadi sama seperti laki-laki. Kesetaraan gender berarti bahwa kesempatan dan hak-haknya tidak bergantung apakah ia (secara biologis) perempuan atau laki-laki. Kesetaraan gender perlu dipahami dalam arti bahwa perempuan dan laki-laki menikmati status yang sama; berada dalam kondisi dan mendapat kesempatan yang sama untuk merealisasikan potensinya sebagai hak-hak dasarnya, sehingga sebagai perempuan ia dapat menyumbang secara optimal pada pembangunan politik, ekonomi, sosial, budaya dan mempunyai kesempatan yang sama dalam menikmati hasil pembangunan.³² Dalam menuntut haknya, perempuan harus tetap melaksanakan kewajibannya sebagai seorang perempuan. Jika dia telah berkeluarga, maka dia harus tetap mengutamakan keluarganya dengan menjadi ibu rumah tangga yang mampu melayani

suaminya dan mengayomi anak-anaknya. Jika perempuan sudah mengerti akan kodrat dan tugasnya, maka perempuan tidak perlu untuk bersusah payah mengikuti kontes kecantikan hanya untuk menyuarakan haknya di masyarakat.

Kontes kecantikan seperti Miss Indonesia turut menguatkan adanya mitos kecantikan. Salah satu syarat utama untuk mengikuti pemilihan putri ini tentunya adalah memiliki fisik yang bagus meliputi wajah, kulit, dan proporsi tubuh. Maka pada pemilihan putri Indonesia tahun 1970-an persyaratan utama adalah memiliki ukuran DPP (Dada-Pinggang-Pinggul) yang ideal. Hal inilah yang kemudian menjadi kontroversi saat itu karena pengukuran DPP cenderung mengarah kepada pelecehan seksual hingga akhirnya syarat tersebut dihapuskan pada tahun-tahun selanjutnya.

Meskipun syarat tersebut dihapuskan, namun tidak serta merta menghilangkan pemujaan masyarakat akan kecantikan fisik. Dalam pemilihan Miss Indonesia, penampilan wajah dan tubuh yang menarik tetap menjadi poin utama penilaian. Perempuan yang boleh mengikuti kontes ini adalah mereka yang berusia 16-25 tahun. Hal ini karena pada usia ini perempuan masih memiliki postur tubuh yang baik, kulit yang mulus dan kencang, dan sebagainya. Pada usia ini bentuk fisik masih mudah untuk diolah dan diubah sesuai keinginan pemiliknya.

Seperti yang telah dijelaskan dalam bab sebelumnya, bahwa menjadi seorang Miss Indonesia merupakan suatu kebanggaan karena dianggap telah melangkah ke kelas sosial di atasnya. Para kontestan Miss Indonesia yang cantik secara fisik juga turut mempengaruhi pemikiran perempuan-perempuan lainnya. Mereka percaya jika bisa cantik seperti para putri tersebut, maka mereka juga bisa masuk ke dalam kelas sosial para putri. Mereka pun berlomba-lomba untuk tampil cantik seperti para putri kecantikan dengan melakukan berbagai perawatan kecantikan yang menghabiskan banyak waktu, uang, tenaga, dan pikiran.

Ketika melihat tayangan pemilihan Miss Indonesia di televisi atau surat kabar, masyarakat khususnya perempuan hendaknya dapat mengambil sisi positifnya. Sisi positif yang dimaksud misalnya sebatas mengagumi kecantikan para kontestan sebagai bentuk anugerah dan ke-Maha Besar-an Tuhan yang mampu menciptakan makhluk sempurna itu. Namun perempuan tidak boleh terlena akan kecantikannya hingga menyalahkan dirinya sendiri karena tidak mampu secantik para kontestan itu. Cantik itu relatif, karena cantik di mata si A belum tentu cantik di mata si B. Setiap perempuan harus memiliki *inner beauty* dan *outer beauty*. Kecantikan rupa tidak akan berguna jika tidak memiliki perilaku dan budi pekerti yang baik. Kecantikan hati dan perilaku-lah yang akan menempatkan seorang perempuan di derajat yang lebih terhormat di antara manusia lainnya.

6. Pelarangan resmi dari Pemerintah

Semakin gencarnya penyelenggaraan Miss Indonesia membuat Pemerintah gerah juga. Pemerintah pun mengeluarkan beberapa keputusan resmi yang isinya melarang sebagian atau melarang sama sekali penyelenggaraan kontes kecantikan di Indonesia dan

³⁰ Heniy Astiyanto. 2006. *Filsafat Jawa : Menggali Butir-butir Kearifan Lokal*. Yogyakarta: Warta Pustaka, hal: 106.

³¹ *Ibid.* hal: 109

³² Saparinah Sadli: PEMBERDAYAAN Perempuan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, dalam T.O. Ihromi, Sulistyowati Irianto, dan Achi Sudiarti Luhulima (ed.). 2006. *Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan*. Bandung: PT Alumni, hal:8

keikutsertaannya ke kontes kecantikan luar negeri. Berikut adalah beberapa larangan dari pemerintah mengenai kontes kecantikan.³³

1. Surat Gubernur DKI Jakarta No. 3554/VIII/1980 tanggal 9 Agustus 1980, yang ditandatangani oleh Bpk. Tjokropranolo selaku Gubernur DKI Jakarta, ditujukan kepada Sdri. Andi Nurhayati dari Andi Beauty Institut Jakarta selaku Pemegang Franchise Internasional untuk Miss World dari tahun 1976 - 1992 dan Miss Universe dari tahun 1980 - 1985, perihal Larangan untuk melakukan Pemilihan Puteri Indonesia dan pengirimannya ke Luar Negeri.
2. Surat Departemen Perhubungan - Direktorat Jenderal Pariwisata RI No. 142/D.I/VI/1981 tanggal 27 Juni 1981, yang ditandatangani oleh Bpk. Achmad Tirtosudiro selaku Direktur Jenderal Pariwisata RI, ditujukan kepada Sdr. Ketua Kamar Dagang dan Industri Jakarta, perihal Pemilihan Miss Universe, yang berisikan pemerintah tidak memberikan izin bagi penyelenggaraan Miss-Miss di Indonesia, sekaligus tidak menyetujui pengiriman Gadis Teladan Indonesia 1981 ke Pemilihan Miss Universe 1981 di New York.
3. Instruksi Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi RI No. 1M.I/HK/208/MPPT/84 tanggal 30 Januari 1984, yang ditandatangani oleh Bpk. Achmad Tahir selaku Menparpostel RI, yang berisikan Instruksi Pengadaan Aturan tentang Keikutsertaan Wanita Warga Negara Indonesia dalam Lomba Kecantikan di Luar Negeri.
4. SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 0237/U/1984 tanggal 26 Mei 1984, tentang Penataan Pelbagai Kegiatan Pemilihan Ratu atau sejenisnya, yang ditandatangani oleh Bpk. Prof. DR. Nugroho Notosusanto selaku Mendikbud RI.

Dalam keputusan ini dijelaskan bahwa kegiatan pemilihan ratu dan sejenisnya dapat digolongkan menjadi dua jenis, yaitu yang mempunyai dampak positif dan yang mempunyai dampak negatif. Berikut adalah kutipan Kepmendiknas mengenai kriteria pemilihan ratu kecantikan di Indonesia.

BAB II KRITERIA

Pasal 3

Kegiatan Pemilihan “ratu” atau sejenisnya yang mempunyai dampak positif, adalah kegiatan yang menurut sifat dan bentuknya dapat menunjang keberhasilan pelaksanaan pembangunan di berbagai bidang sesuai Garis-garis Besar Haluan Negara yaitu:

1. Yang mempromosikan peningkatan penggunaan produksi dalam negeri;
2. Yang memperagakan dan melestarikan budaya dan adat istiadat daerah dalam rangka pengembangan kebudayaan nasional;
3. Yang merangsang prestasi dan kreativitas;

4. Yang memperagakan atau melombakan keahlian hasil ketekunan.

Pasal 4

Kegiatan pemilihan “ratu” atau sejenisnya yang mempunyai dampak negatif, adalah:

1. Yang bertentangan dengan ajaran agama yang dianut oleh masyarakat;
2. Yang tidak mencerminkan nilai-nilai sosial budaya bangsa yang luhur;
3. Yang penilaiannya semata-mata ditujukan kepada penonjolan badaniah, paras muka, ukuran dan bentuk tubuh serta gaya yang berlebih-lebihan yang menjurus pada daya tarik berdasarkan selera rendah;
4. Yang dapat menimbulkan dan menumbuhkan rasa rendah diri pada orang sejenis dan seusia yang kurang beruntung untuk ikut serta karena pelbagai alasan;
5. Yang dapat menimbulkan keresahan dan mengganggu ketertiban lingkungan.

Pada akhir Juli 1984, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan petunjuk pelaksanaan (juklak) SK Menteri P & K No. 0237 yang dikeluarkan pada tanggal 26 Mei 1984. SK tersebut secara tidak langsung memperbolehkan kontes atau pemilihan perempuan ayu di Indonesia, asalkan kegiatan itu mempunyai “dampak positif” dan “tidak menjurus untuk memenuhi selera rendah”. Berbagai batasan itu memang belum jelas dan bisa memancing kesimpangsiuran. Karena itu dipersiapkan sebuah juklak, hasil kerjasama Departemen P & K dengan berbagai lembaga negara lainnya, seperti Departemen Agama, Kejaksaan Agung, dan Departemen Pariwisata, Pos dan Teknologi (Parpostel), yang sudah dirancang sejak bulan Januari 1984.³⁴

5. Instruksi Dirjen Pariwisata No. 02/INST/VII/1984, tanggal 27 Juli 1984, yang ditandatangani oleh Bpk. Joop Ave selaku Direktur Jenderal Pariwisata RI, tentang Larangan kegiatan Ratu-ratuan yang berdampak negatif sebagaimana dimaksud dalam SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 0237/U/1984 tanggal 26 Mei 1984.
6. Surat Departemen Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Direktorat Jenderal Pariwisata RI No. 66/B.4/IX/84 tanggal 14 September 1984, yang ditandatangani oleh Bpk. Joop Ave selaku Direktur Jenderal Pariwisata RI, kepada Sdri. Andi Nurhayati dari Andi Beauty Institut Jakarta selaku Pemegang Franchise Internasional untuk Miss World dari tahun 1976 - 1992 dan Miss Universe dari tahun 1980 - 1985, perihal Pengiriman Putri Indonesia ke Miss World, yang berisikan bahwa Pengiriman Puteri Indonesia ke Miss World tidak dibenarkan.

Peraturan-peraturan tersebut menunjukkan upaya yang tegas dari pemerintah untuk menghentikan segala

³³ <http://www.scribd.com/doc/3889369/surat-untuk-presiden-tentang-miss-universe> diakses 05062014 pkl.19:45

³⁴ *Tempo*, 14 Juli 1984, *loc.cit.*

kegiatan yang berbau kontes kecantikan. Peraturan tersebut tidak hanya dari satu instansi, melainkan berbagai instansi dan ada pula yang bekerjasama antar instansi. Beberapa peraturan berisi tentang penataan dan pengaturan kegiatan kecantikan dengan tujuan agar masyarakat tidak kaget dan tidak melakukan demonstrasi jika kontes kecantikan ini tiba-tiba langsung dilarang.

7. Dampak Kontroversi Miss Indonesia 1982-1984

a. Bidang Sosial

Adanya kontroversi Miss Indonesia memberikan pengaruh yang cukup besar bagi beberapa pihak yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan kontes kecantikan ini.

Para sponsor dan pemegang lisensi sebagai penyelenggara di tingkat nasional maupun internasional adalah pihak pertama yang paling merasa tertekan dengan adanya pelarangan-pelarangan dari pemerintah. Larangan pemerintah tersebut bersifat resmi, sehingga jika mereka tidak mengindahkannya maka pemerintah dapat menjatuhkan sanksi. Salah satu contohnya adalah yang dialami Andi Nurhayati, seorang pemegang lisensi untuk pengiriman di ajang Miss World dan Miss Universe. Pemerintah terus mendesaknya agar melepaskan lisensi-lisensi kontes kecantikan internasional miliknya. Akhirnya setelah berhasil mengiriskan Titi Dwi Jayati, ia segera memutuskan untuk melepaskan lisensi miliknya. Satu per satu lisensi kontes putri-putrian mulai dilepaskan, mulai dari Miss Asia Quest hingga Miss World pada tahun 1985. Berharap pemerintah akan melunak, Andi Nurhayati tetap memegang lisensi Miss Universe hingga tahun 1992.³⁵

Perusahaan-perusahaan yang menjadi sponsor juga merasa takut terhadap peraturan-peraturan tersebut. Tidak jarang para sponsor yang telah mendukung kontes kecantikan sejak awal tiba-tiba menghentikan dukungannya. Hal ini pernah terjadi kepada Andi Botenri ketika mengikuti Miss World 1982 dan Miss Universe 1983. Para sponsor tiba-tiba menghentikan dukungan kepadanya beberapa minggu sebelum keberangkatannya ke luar negeri karena adanya larangan-larangan dari pemerintah.³⁶

Mundurinya para sponsor juga turut mempengaruhi penyelenggaraan kontes kecantikan. Kurangnya dana untuk membiayai kegiatan dapat menyebabkan penyelenggaraan kontes menjadi kurang maksimal, bahkan kadang menyebabkan kevakuman.

Kontroversi Miss Indonesia menyebabkan pemerintah selalu mengawasi setiap gerak-gerik kontes kecantikan ini. Meskipun pemerintah telah mengeluarkan setidaknya enam peraturan-peraturan dan larangan-larangan mengenai kontes kecantikan di Indonesia, namun masih ada saja pihak-pihak yang menginginkan dan menyelenggarakan kontes kecantikan selama masa Orde Baru. Menanggapi hal ini, pemerintah kemudian menerbitkan Surat Keputusan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan - Direktorat Jenderal Kebudayaan No.

0646/Fl.IV/J.96 tanggal 25 Juni 1996, yang ditandatangani oleh Bpk. Prof. Dr. Edi Sedyawati selaku Direktur Jenderal Kebudayaan RI, tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 0237/U/1984 Tentang Penataan Pelbagai Kegiatan Pemilihan Ratu atau sejenisnya. Dengan adanya petunjuk pelaksanaan ini diharapkan kegiatan kontes kecantikan di Indonesia akan lebih tertib dan sesuai dengan cita-cita perjuangan bangsa.

Pemerintah Orde Baru tetap menerima dan mendukung pemilihan-pemilihan sejenis kontes kecantikan yang lebih banyak menonjolkan aspek kecerdasan dan budi pekerti. Hal ini dapat dibuktikan dengan dukungan yang diberikan Ibu Tien Soeharto kepada pemilihan Putri Ayu Indonesia dan Putri Remaja Indonesia yang bertujuan memilih remaja putri yang memiliki wawasan intelektual tinggi.

Adanya sikap kontra dari masyarakat mengenai kontes kecantikan tentu juga menjadi pukulan yang berat bagi para kontestan dari Indonesia. Setelah mengetahui kehadirannya pada kontes ratu kecantikan di St. Louis mengundang banyak protes di tanah airnya sendiri, Andi Botenri bukan hanya grogi, sehingga bertanding kurang tenang, tetapi juga sampai sakit. Tenri terlalu banyak berpikir tentang berita-berita yang gencar tersebut. Akibatnya peluang untuk masuk semifinal pun hilang.³⁷

Tekanan psikologis juga dialami oleh Titi Dwi Jayati yang mengikuti Miss World 1983. Sepulangnya dari ajang tersebut Titi mendapat banyak hujatan dari berbagai pihak. Bahkan pihak sekolahnya pun mendapat teguran keras dari Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan. Berbagai media massa dan masyarakat memprotes keberangkatannya dan menyebutnya sebagai kontestan ilegal dan dituduh melanggar norma susila.

Para peserta Miss Indonesia lainnya juga mengalami tekanan yang berat akibat hujatan dari masyarakat. Namun mereka selalu mengambil sisi positif dari keikutsertaan mereka dalam kontes kecantikan nasional maupun internasional sebagai bekal mereka dalam meniti karir di masa depan.

Meskipun Andi Nurhayati akhirnya menghentikan kegiatan kontes kecantikannya, ternyata hal ini tidak menyurutkan niat dan semangat bagi pihak-pihak yang tetap ingin menyelenggarakan kontes kecantikan dengan berbagai jenis. Ini terbukti dengan tetap ramainya berbagai kontes kecantikan yang diselenggarakan oleh pihak-pihak swasta seperti majalah, kosmetik, dan sebagainya pada masa Orde Baru. Peserta yang boleh ikut pun bukan hanya kalangan perempuan saja, namun juga dibuka kontes untuk laki-laki.

Berikut adalah beberapa kontes kecantikan yang diselenggarakan oleh industri-industri swasta.

³⁵ Jawa Pos, 25 November 2005, *loc.cit.*

³⁶ Jawa Pos, 23 November 2005, hal: 15

³⁷ Fokus, 04 Agustus 1983, *loc.cit.*

Tabel 4.1
Jenis-Jenis Pemilihan Putri Indonesia pada Masa Orde Baru

No.	Diselenggarakan oleh Industri Kosmetika	Diselenggarakan oleh Industri Majalah	Lain-lain
1.	Pemilihan Tiara Sunsilk (Gadis Sunsilk)	Pemilihan putri remaja Indonesia	Pemilihan top model Indonesia/Ra hadian Yamin
2.	Pemilihan Putri Ayu Indonesia	Pemilihan Cowok Sampul Majalah Gadis	Supermodel of the World Indonesia
3.	Pemilihan Wajah Remaja Revlon	Pemilihan Model Majalah (Pemilihan Wajah Femina)	Pemilihan Elite Model Look Indonesia
4.		Pemilihan Gadis Sampul	
5.		Pemilihan LSWENF	
6.		Coverboy Mode	
7.		Pemilihan Covergirl Majalah Mode	
8.		Pemilihan Putra-putri Kampus	
9.		Top Guest Aneka	
10.		Model Sampul Anita	
11.		Coverboy Aneka	
12.		Pemilihan Covergirl Aneka	
13.		Pemilihan Model Kawanku	
14.		Male Pageant (Pemilihan Cosmo Man)	

Sumber: Dinamika Pemilihan "Putri Indonesia" pada Masa Orde Baru oleh Mutiah Amini

b. Bidang Ekonomi

Adanya kontroversi terhadap ajang Miss Indonesia tidak menghentikan roda perekonomian Indonesia terutama perkembangan bisnis industri kosmetik dan majalah sebagai sponsor dan penyelenggara kontes kecantikan. Setelah adanya kontroversi Miss Indonesia, kegiatan pemilihan-pemilihan putra dan putri oleh industri kosmetik dan majalah tetap ramai dan mendapat

sambutan hangat dari masyarakat. Bahkan perusahaan-perusahaan tersebut semakin melebarkan sayapnya. Misalnya kosmetik Sariayu Martha Tilaar yang menyelenggarakan Lomba Cipta Busana Indonesia yang bertujuan mencari perancang muda berbakat yang mampu menampilkan identitas dan pesona Indonesia.³⁸ Lomba ini mendapat sambutan yang baik dari masyarakat dan tokoh-tokoh masyarakat. Masyarakat juga tetap percaya terhadap produk-produk Sariayu. Hal ini dapat dilihat dengan semakin berkembangnya produk-produk kosmetik ciptaan Martha Tilaar yang tidak hanya dipasarkan di dalam negeri saja tetapi juga merambah pasar internasional. Martha Tilaar juga mendirikan salon dan sekolah kecantikan di berbagai daerah di Indonesia.

Industri majalah juga semakin ramai. Pemilihan-pemilihan yang banyak dipublikasikan di media massa menarik perhatian masyarakat untuk membeli majalah tersebut demi mendapatkan informasi mengenai kontes kecantikan. Hal ini tentu semakin menambah penghasilan dari majalah tersebut. Bahkan beberapa majalah juga mengadakan pemilihan putera-puteri yang nantinya akan menjadi duta majalah tersebut.

C. Penutup

Kontes kecantikan Miss Indonesia menjadi salah satu ajang pencarian bakat yang banyak menimbulkan pro dan kontra. Kritik dari masyarakat terhadap kontes kecantikan Miss Indonesia umumnya didasarkan pada konteks kebudayaan yang dimiliki bangsa Indonesia. Adanya tujuan-tujuan ekonomi dan sosial yang menyelubungi kontes ini, dan kekhawatiran akan eksploitasi perempuan juga menjadi alasan masyarakat tidak pernah menyetujui adanya kontes kecantikan dengan segala jenisnya.

Kritik yang bertubi-tubi dari masyarakat mendorong pemerintah untuk menertibkan kegiatan ini. Beberapa instansi pemerintahan bekerja sama dalam mengeluarkan sebuah keputusan. Keputusan-keputusan tersebut mulai dari sekedar menata dan menertibkan prosedur kegiatan hingga benar-benar melarang diselenggarakannya kontes kecantikan di Indonesia. Kontroversi ini menyebabkan kontes kecantikan di Indonesia sempat mengalami kevakuman.

Hasil penelitian ini menggambarkan kondisi sosial pada masa Orde Baru. Pada masa ini Indonesia melakukan pembangunan di berbagai bidang, namun diiringi dengan munculnya berbagai permasalahan sosial. Berbagai kegiatan masyarakat yang dinilai tidak sesuai dengan visi dan misi pemerintah akan ditindak dengan tegas. Ketegasan pemerintah ini mampu meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap berbagai peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran agar masyarakat dapat menelaah sisi positif dan negatif menyikapi kontroversi kontes-kontes perempuan.

³⁸ Kompas, 1 Desember 1985

Melalui penelitian ini diharapkan Pemerintah dapat lebih bijaksana dalam mengambil keputusan yang bertujuan untuk mengatasi permasalahan sosial agar tidak menimbulkan kekecewaan dari masyarakat dan kondisi masyarakat yang aman dapat tercapai.

Untuk pengembangan penelitian ini, peneliti selanjutnya dapat mengambil sudut pandang dari sisi lain misalnya sudut pandang politik dan pengaruhnya bagi perpolitikan di Indonesia.

Daftar Pustaka

A. Surat Kabar dan Majalah

Analisa Media, edisi September 2013

Fokus, 04 Agustus 1983

Jawa Pos, 06 Agustus 1982

Jawa Pos, 23 November 2005

Jawa Pos, 25 November 2005

Kompas, 1 Desember 1985

Sketsmasa, 16/XXII, 1-15 Agustus 1980

Tempo, 12 Maret 1977

Tempo, 14 Agustus 1982

Tempo, 14 Juli 1984

Varia, No. 796, 18 Juli 1973

B. Arsip

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0237/U/1984 tentang Penataan Pelbagai Kegiatan Pemilihan Ratu atau Sejenisnya.

C. Buku

Heniy Astiyanto. 2006. *Filsafat Jawa : Menggali Butir-butir Kearifan Lokal*. Yogyakarta: Warta Pustaka.

J. Dwi Narwoko & Bagong Suyanto. 2004. *Sosiologi: Teks Pengantar & Terapan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

T.O. Ihromi, Sulistyowati Irianto, dan Achi Sudiarti Luhulima (ed.). 2006. *Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan*. Bandung: PT Alumni.

D. Jurnal dan Skripsi

Mutiah Amini. Laporan Penelitian *Dinamika Pemilihan "Putri Indonesia" pada Masa Orde Baru*, diterbitkan oleh Universitas Gadjah Mada, diakses dari www.geocities.ws/.../mutia_aminimakalah_putri_indonesia.pdf pada tanggal 23 Mei 2013.

Reyza Fitri Aninda. 2012. Skripsi: *Perlindungan Hukum Terhadap Hak bagi Peserta, Pemenang, Penyelenggara, dan Pihak Ketiga dalam Penyelenggaraan Kontes Kecantikan di Indonesia*. Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

E. Internet

<http://www.scribd.com/doc/3889369/surat-untuk-presiden-tentang-miss-universe> diakses pada tanggal 05 Juni 2014 pk1.19:45 WIB.

<http://www.voaindonesia.com/content/miss-muslimah-untuk-tandingi-miss-world/1753492.html> diakses 24 Juli 2014 pk1.12.13

<http://www.voaindonesia.com/read/liberalism/2013/09/02/26607/bu-ya-hamka-tentang-bahaya-kontes-kecantikan-miss-world/#sthash.gKC2EDha.dpbs> pada tanggal 03 Juni 2014

